

Pemenuhan Hak Korban Teror Perlu Diperhatikan

written by Harakatuna

Harakatuna.com. Jakarta-Indonesia menjadi negara yang tak sekali dua kali menjadi sasaran serangan [teroris](#). Mulai dari Bom Bali 2002 hingga terbaru Bom Surabaya 2018 yang menyita banyak perhatian publik.

Sebagai negara yang rentan akan serangan [teroris](#), Aliansi Indonesia Damai (AIDA) menilai, pemerintah perlu menjamin hak-hak para korban serangan terorisme.

Direktur AIDA, Hasibullah Satrawi mengatakan, pemenuhan hak-hak korban terorisme belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah. Oleh karena itu, dia mendorong pemenuhan hak itu.

“Kami mendorong pemerintah, kementerian, dan lembaga negara terkait untuk terus memaksimalkan upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak korban terorisme sesuai dengan perundangan maupun peraturan yang berlaku,” kata Hasibullah dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Selain itu, Hasibullah menekankan supaya pemerintah segera mengesahkan peraturan pemerintah yang dapat mengakomodir hak dari korban [terorisme](#) lama. Karena peraturan saat ini, kata Hasibullah, korban hanya mendapatkan kompensasi melalui putusan pengadilan. Sedangkan peristiwa terorisme lama putusannya telah ditetapkan.

“Kami mendorong Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, Kementerian Keuangan, LPSK, dan BNPT agar segera menerbitkan PP dari UU Nomor 5 Tahun 2018 sebagai aturan turunan untuk memberikan kompensasi pada korban terorisme lama,” tutur Hasibullah.